IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (STUDI PADA SMA NEGERI 2 PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN)

Winny Abdillah[1], Yusnanik Bakhtiar[2], Henni Muchtar[3], Oktaviani Puspita Sari[4]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : [1]winnyabdillah49@gmail.com, [2]nanikbakhtiar83@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBG berjalan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi awal berdasarkan Petunjuk Teknis. Pelaksanaan menunjukkan kesiapan, namun terdapat kendala diantaranya distribusi makanan yang dilakukan dalam empat tahap karena keterbatasan sarana transportasi. Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung ke sekolah dan evaluasi daring. Faktor pendukung meliputi tenaga pelaksana, dukungan sekolah, dan MoU dengan pihak terkait. Upaya mengatasi kendala yang ada melalui penyesuaian distribusi dan evaluasi berkala oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Makan Bergizi Gratis (MBG)*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Free Nutritious Food (MBG) policy at SMA Negeri 2 Painan, as well as identify supporting factors, obstacles, and efforts in overcoming implementation obstacles. This research uses descriptive qualitative methodology with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation studies. Data analysis used data collection, reduction, data presentation, and conclusion drawing, with validity testing through triangulation of sources and techniques. The results showed that the implementation of the MBG policy went through the stages of planning, implementation, and supervision. Planning is done through initial coordination based on the Technical Guidelines. Implementation showed readiness, but there were obstacles including food distribution which was carried out in four stages due to limited transportation facilities. Supervision is conducted through direct monitoring and online evaluation. Supporting factors include implementing staff, school support, and MoUs with related parties. Efforts to overcome existing obstacles through distribution adjustments and periodic evaluations by the National Nutrition Agency (BGN) and the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG).

Keywords : *Implementation, policy, Free Nutritious*

PENDAHULUAN

Dalam era society 5.0, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa (Abdillah, 2024: 15). Namun saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan yang dapat menghambat pendidikan yang berkualitas. Menurut Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyampaikan bahwa anak di Indonesia saat ini mengalami kekurangan gizi sehingga cenderung mengalami kesulitan dalam konsentrasi dan pencapaian prestasi akademik. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah program yang dicanangkan oleh presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) (kemenkopmk.go.id, 2024). Program ini telah masuk dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 serta diperkuat dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Kartika & Hermawan, 2024).

Salah satu penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah siswa jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, hingga menengah (Andin, dkk., 2024: 372). SMA Negeri 2 Painan merupakan salah satu sekolah yang ada di kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara serentak dilaksanakan perdana pada tanggal 13 Januari 2025 di kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBG masih belum optimal dan belum menyentuh seluruh satuan pendidikan yang membutuhkan, khususnya di kecamatan IV Jurai. Dari 7 sekolah tingkat SMA/SMK/SLB yang ada di kecamatan IV Jurai hanya satu sekolah yang telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu SMA Negeri 2 Painan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Prof. Dr. Pratikno, M.Soc., menyatakan bahwa penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) ini masih belum merata di seluruh Indonesia (Kartika & Hermawan, 2024).

Dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 2 Painan, makanan diantar setiap hari pukul 11.30 WIB dan didistribusikan di lobi utama sekolah karena dapat menampung sebanyak 1269 porsi makanan sesuai dengan kesepakatan awal. Menu makanan yang disajikan umumnya mencakup nasi, lauk hewani (seperti ayam, ikan), sayur mayur, dan buah (pisang atau semangka). Meskipun disusun oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan prinsip gizi seimbang, namun pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sarana transportasi dalam proses pengantaran makanan. Akibatnya, distribusi makanan sering mengalami keterlambatan, yang secara tidak langsung mengganggu aktivitas belajar siswa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Penelitian ini mempunyai kebaruan secara khusus tentang khususnya mengenai implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi pada SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)". Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diimplementasikan di SMA Negeri 2 Painan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menggali berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam penyempurnaan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik di tingkat daerah maupun nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan metode deskriptif yang memberikan gambaran mendalam tentang implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan, kecamatan IV Jurai, kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Painan yang dipilih berdasarkan dengan petunjuk teknis karena berada dalam radius maksimal 6 km atau waktu tempuh 20 menit dari lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan MBG di SMA Negeri 2 Painan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan analisis data melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Di SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Temuan penelitian terkait implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan dianalisis melalui pendekatan teori implementasi kebijakan menurut Dorey (dalam Atikah & Handayani, 2024: 744–745), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap krusial dalam siklus implementasi kebijakan karena menjadi fondasi bagi keberhasilan pelaksanaan program. Menurut Dorey (dalam Atikah & Handayani, 2024: 749), perencanaan kebijakan publik mencakup kegiatan menetapkan tujuan, merancang strategi, serta mengalokasikan sumber daya agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

1) Penyampaian Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dikomunikasikan dengan baik kepada pihak sekolah. Penyampaian informasi dilakukan secara bertahap, mulai dari koordinasi awal yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada kepala sekolah beserta jajaran, hingga penyampaian informasi kepada siswa melalui upacara dan wali kelas. Hal ini sesuai dalam penelitian sebelumnya (Sahroji dkk., 2022) menyebutkan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya Susanto (2022: 1201) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan penyampaian tujuan dan komunikasi antar-stakeholder. Ketika sasaran kebijakan memahami tujuan dan manfaatnya, maka resistensi dapat diminimalisir dan partisipasi meningkat.

2) Alokasi Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks penelitian ini meliputi aspek material dan tenaga kerja. Pada aspek material (makanan), perencanaan menu MBG dilakukan secara sistematis oleh Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG), sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Penyusunan menu dilakukan mingguan, mencakup penetapan jenis bahan pangan, frekuensi penggunaan, dan standar porsi (gramasi). Pengawasan mutu makanan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM, dan Dinas Kesehatan, serta mendapat pengawasan eksternal dari aparat kepolisian. Ini menunjukkan adanya komitmen terhadap kualitas dan keamanan pangan yang tinggi. Hal ini juga diperkuat oleh teori dari Mursalim (2017:130) yang menyebutkan bahwa sumber daya materi menjadi salah satu pilar utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.Selain itu, terkait dengan aspek tenaga kerja, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merekrut 50 tenaga kerja lokal yang telah diberikan pelatihan sebelum dapur beroperasi, mencakup pelatihan tugas pokok, kebersihan, dan tata boga. Selain itu, pihak sekolah juga menyusun sistem piket harian yang melibatkan unsur guru, pegawai tata usaha, pustakawan, dan satpam guna membantu distribusi makanan. Lebih lanjut, menurut teori Edward III (dalam Aisah dkk., 2021: 140), sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

3) Perumusan Strategi Implementasi

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan, strategi implementasi dirancang secara terencana dan terstruktur dengan merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, pelaksanaan teknis di lapangan diperkuat melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pihak sekolah dengan pelaksana program. Selanjutnya, diperlukan strategi untuk mendistribusikan makanan kepada siswa. Prosedur distribusi makanan dilakukan melalui skema teknis yang terorganisir. Makanan diletakkan di lobi utama sekolah sebagai titik distribusi. Ketua kelas dengan bantuan dua orang temannya bertugas mengambil dan membagikan makanan ke dalam kelas masing-masing. Pembagian makanan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kelas fase E terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kelas fase F. Setelah selesai makan, setiap perwakilan kelas bertanggung jawab untuk mengembalikan wadah makanan ke lobi sekolah sesuai dengan jumlah yang telah diambil.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan merupakan fase krusial di mana kebijakan yang telah direncanakan diterapkan secara nyata dan operasional di lapangan (Atikah & Handayani, 2024). Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 2 Painan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan kesiapan teknis, komitmen pelaksana, dan koordinasi antar pihak yang relatif baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Kesiapan teknis menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2018). Dalam penelitian ini, sarana distribusi makanan sudah tersedia dan pengantaran dilakukan setiap hari pada pukul 11.30 WIB di lobi sekolah. Namun, keterbatasan kapasitas transportasi yang hanya mampu membawa 300 porsi per tahap mengharuskan pengantaran dilakukan dalam empat tahap untuk memenuhi total kebutuhan 1269 porsi. Hal ini menyebabkan proses pengantaran tidak efisien dan berpotensi menimbulkan penundaan. Temuan ini sejalan dengan teori Mahendra dkk. (2023: 1859) sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu untuk mengimplementasikan strategi agar dapat berjalan dengan baik, optimal, efektif, dan efesien. Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek sumber daya yang dapat berdampak positif dan bermanfaat bagi keberhasilan pelaksana kebijakan atau rencana.

Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam aspek teknis pelaksanaan, khususnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana, namun menu makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan secara umum dapat dikatakan telah memenuhi standar

dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini tercermin dari proses penyusunan menu yang mempertimbangkan kandungan gizi seimbang, keterlibatan tenaga kesehatan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pengawasan, serta pemantauan rutin terhadap bahan dan cara pengolahan makanan. Kualitas makanan ditinjau dari aspek kebersihan, nilai gizi, dan keamanan pangan, sementara kuantitas mengacu pada kecukupan porsi yang diberikan kepada setiap peserta didik sesuai kebutuhan harian.

Selanjutnya, komitmen pelaksana juga merupakan faktor penting dalam tahap pelaksanaan Edward III (dalam Aisah dkk., 2021). Dalam konteks ini, pihak sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan melibatkan berbagai elemen seperti guru, tenaga administrasi, pustakawan, satpam, dan ketua kelas dalam proses distribusi makanan. Setiap elemen menjalankan perannya secara konsisten, seperti guru piket yang mengoordinasikan pengambilan makanan, ketua kelas yang memimpin proses distribusi di kelas, serta petugas kebersihan yang memastikan sanitasi lingkungan makan tetap terjaga. Keterlibatan kolektif ini menunjang kelancaran proses distribusi serta tertibnya pelaksanaan program, sehingga hal ini berdampak langsung terhadap kelancaran proses distribusi makanan, mencegah potensi kekacauan, dan memastikan siswa menerima makanan dalam kondisi baik.

Selain kesiapan teknis dan komitmen pelaksana kebijkan, koordinasi antar pihak termasuk aspek penting yang memengaruhi hasil implementasi. Di SMA Negeri 2 Painan, adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara sekolah dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan upaya formalisasi kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meski demikian, terdapat indikasi miskomunikasi dalam koordinasi, seperti kurangnya pemberitahuan terkait siswa yang mengikuti kegiatan di luar sekolah sehingga terjadi kelebihan makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja koordinasi sudah ada, aspek komunikasi antar pihak masih perlu diperbaiki agar alur informasi berjalan lancar dan tidak mengganggu distribusi makanan.

c. Pengawasan

Tahap pengawasan merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan (Atikah & Handayani, 2024). Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan, proses pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui dua mekanisme utama, yaitu monitoring langsung di lapangan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan evaluasi daring yang rutin oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengawasan yang dilakukan mampu mengidentifikasi permasalahan seperti keterlambatan distribusi dan kurangnya koordinasi antar pihak pelaksana. Identifikasi ini sangat penting untuk memungkinkan penyesuaian operasional secara cepat agar program tetap berjalan sesuai sasaran dan tidak mengurangi manfaat yang diterima siswa.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Di SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya program di tingkat sekolah. Faktor-faktor tersebut dapat berperan sebagai pendorong keberhasilan maupun sebagai hambatan yang mengganggu efektivitas implementasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merujuk pada elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan, kemajuan, penambahan, dan peningkatan sesuatu dibandingkan sebelumnya. Faktor pendukung juga dapat dianggap sebagai dorongan yang menjaga konsistensi dalam melaksanakan hal-hal tertentu (Sutaryo, 2019 : 22). Dalam kasus kebijakan MBG di SMA Negeri 2 Painan, terdapat beberapa faktor pendukung utama yang ditemukan:

1) Jumlah Tenaga yang Cukup Memadai

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari berbagai unsur di lingkungan sekolah dan dapur penyedia menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penugasan lima tenaga dari sekolah dan 50 tenaga di dapur memudahkan distribusi dan penyediaan makanan secara efisien. Hal ini sejalan dalam penelitian (Aisah dkk., 2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas tenaga pelaksana yang memadai. Selain itu, penelitian oleh Handoko (2020) menegaskan bahwa keberadaan tenaga yang cukup dan kompeten berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

2) Dukungan dari Pihak Sekolah

Komitmen dan dukungan aktif dari pihak sekolah, mulai dari pimpinan hingga tenaga pendidik, turut mendukung kelancaran implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis MBG) di SMA Negeri 2 Panan. Partisipasi aktif ini mencakup pengawasan, evaluasi, dan penerimaan positif dari siswa yang tentunya berdampak pada kelancaran pelaksanaan program sehari-hari, karena siswa menjadi lebih disiplin dalam mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, seperti pengambilan dan pengembalian alat makan. Penelitian oleh Wahyuni (2021: 203) juga menunjukkan bahwa dukungan dari institusi pelaksana dapat meningkatkan keberhasilan program pemerintah di tingkat sekolah.

3) Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU)

Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati sebagai landasan pelaksanaan kebijakan MBG memberikan dasar legal dan operasional yang jelas antara berbagai pihak terkait. Hal ini memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam implementasi program. Dalam (Aisah dkk., 2021) adanya kesepakatan formal seperti Memorandum of Understanding (MoU) menjadi faktor penting untuk mengurangi hambatan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan publik.

b. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, terdapat pula hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu keterbatasan transportasi pengangkut makanan. Terbatasnya kendaraan pengangkut, hanya dua unit dengan kapasitas sekitar 300 porsi per perjalanan, menyebabkan distribusi makanan harus dilakukan dalam empat tahap. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan pengantaran dan gangguan aktivitas sekolah diantaranya siswa keluar masuk kelas menunggu makanan datang. Temuan ini sesuai dengan teori kendala dalam implementasi kebijakan menurut Sabatier (dalam Aisah dkk., 2021), yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya fisik seperti transportasi dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga dan dukungan institusi, serta kepastian legalitas melalui *Memorandum of Understanding* (MoU). Namun, hambatan berupa keterbatasan transportasi perlu segera diatasi melalui peningkatan kapasitas atau pengaturan jadwal distribusi yang lebih efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Upaya Pihak Terkait dalam Mengatasi Permasalahan pada Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa berbagai pihak terkait telah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan yang timbul selama implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan.

1) Menyusun Strategi Distribusi yang Lebih Efektif

Penyesuaian waktu pengantaran makanan agar lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kondisi lapangan merupakan bentuk adaptasi yang menunjukkan komitmen dan inovasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Poppy Eriyani, mengungkapkan bahwa pihaknya berusaha meningkatkan kecepatan dan efektivitas kerja dalam menyiapkan dan mengantarkan makanan. Sikap proaktif ini mencerminkan prinsip responsivitas birokrasi yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan kecepatan dalam menanggapi masalah pelaksanaan (Aisah dkk., 2021: 141). Penyesuaian jadwal pengantaran agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar sejalan dengan pendekatan koordinasi yang baik antar *stakeholder*.

2) Evaluasi Rutin dan Monitoring Pelaksanaan

Upaya monitoring dan evaluasi secara rutin yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kunjungan langsung maupun evaluasi daring bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan aktif. Kunjungan langsung yang dilakukan oleh BGN sebanyak dua kali serta evaluasi melalui pertemuan daring menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian integral dari manajemen kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Evaluasi yang berkelanjutan menjadi bagian dari mekanisme feedback dalam siklus kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Aisah dkk. (2021: 143) yang menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Penelitian oleh Wahyuni (2021: 99) turut memperkuat bahwa monitoring yang konsisten oleh lembaga pengawas kebijakan memberikan dampak positif terhadap ketepatan implementasi dan peningkatan kualitas pelayanan kebijakan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, kebijakan disosialisasikan secara berjenjang dan didukung dengan alokasi sumber daya yang memadai, baik dari segi material maupun tenaga kerja yang telah dilatih. Strategi implementasi juga disusun berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dalam tahap pelaksanaan, terlihat adanya komitmen kuat dari pelaksana serta keterlibatan aktif seluruh unsur sekolah, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan transportasi dan koordinasi antar pihak. Sementara itu, pengawasan dilakukan secara langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta melalui evaluasi daring oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berkontribusi terhadap perbaikan operasional secara berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut ditopang oleh beberapa faktor pendukung, seperti tersedianya tenaga pelaksana yang memadai, dukungan aktif dari

pihak sekolah, dan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai dasar legalitas dan koordinasi antar pihak. Namun, hambatan berupa keterbatasan sarana transportasi makanan menjadi tantangan yang cukup signifikan karena berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan aktivitas belajar siswa. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui penyesuaian waktu pengantaran dan koordinasi lintas pihak yang lebih optimal. Monitoring dan evaluasi yang rutin dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menunjukkan komitmen terhadap peningkatan mutu pelaksanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Painan telah menunjukkan arah yang positif dan adaptif, meskipun masih diperlukan perbaikan teknis agar tujuan peningkatan gizi dan konsentrasi belajar siswa dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, F. (2024). Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Indonesia. Educazione: Jurnal Multidisiplin, 1(1), 13-24

Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (Akm): Analisis Implementasi Kebijakan Akm. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, 1(2), 128-135.

Andin, A., Risti, D., Latifah, I., Panuntun, M., Nur, M., Selviani, R., & Saptatiningsih, R. I. (2024). Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. Indonesian Journal Of Education And Development Research, 3(1), 370-383.

Atikah & Handayani. (2024). Manajemen Kebijakan Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Kartika & Hermawan. 2024. “Perspektif Kebijakan Dan Anggaran Dari Program Makan Bergizi Gratis”. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-210.pdf diakses pada 3 Februari 2025

Mursalim, S. W. (2017). Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi, 14(1), 126-138.

Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 7(1).

Susanto, H. (2022). "Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Program Sosial." Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 45–59.

Sutaryo. (2019). Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.